

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, pembatasan dan rumusan masalah, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan subyek penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi perubahan sosial yang amat cepat dan makin kompleksnya keadaan masyarakat di era globalisasi dewasa ini telah terjadi di seluruh belahan dunia. Begitu cepatnya perubahan dan perkembangan dunia itu, sehingga beberapa futuris menyebut bahwa "*the world is in the making process.*" Perubahan itu melahirkan diferensiasi dan situasi global yang berbeda dari sebelumnya. Pada gilirannya, perubahan memungkinkan terjadinya ketidakpastian dan kejutan baru (Toffler, 1970; Maslow, 1977; Naisbitt, 1990; Sanusi, 1998; dan Marzurek dkk., 2000). Tetapi perubahan juga sekaligus sebagai peluang berpartisipasi bagi individu untuk mempertahankan dan memperkembangkan eksistensi kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut telah pula mengubah kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan aspek psikologis manusia, termasuk di dalamnya para remaja, antara lain para remaja yang sedang belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA). Dampak tersebut sudah

menembus dunia pendidikan, meliputi segala unsur di dalamnya, yakni siswa, pendidik (guru dan konselor), manajemen dan masyarakat terkait.

Kompleksitas yang diakibatkan oleh perubahan tersebut membawa berbagai implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Orang mengharapkan pendidikan kita hendaknya dapat memberikan sesuatu yang sempurna. Terlebih-lebih lagi, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada kompetisi yang ketat di antara negara-negara di Asia, bahkan di seluruh dunia dalam mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, yang siap dalam situasi kompetisi tersebut. Berbagai tuntutan kualifikasi personil sekolah, termasuk konselor sebagai sebuah profesi harus dipenuhi dalam upaya membekali siswa dengan pengalaman dan keterampilan diri. Namun tidak mungkin memberikan sesuatu yang lengkap, oleh karenanya, siswa harus pula mengembangkan dirinya secara mandiri.

Tuntutan kualifikasi pendidikan dicapai dengan efektif erat sekali hubungannya dengan manusia (dasar filosofis). Mengenai pandangan pendidikan, M.D. Dahlan (1988: 8-12) mengemukakan enam rentang wawasan tentang pendidikan, mulai dari yang paling langsung dan mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari hingga yang paling mendasar dan tuntas. Pandangan tersebut adalah: (1) pengertian bahwa mendidik adalah mengatur tingkah laku anak secara sepihak; (2) pendidikan sepenuhnya harus berpusat pada anak didik; (3) perhatian terhadap aktivitas anak didik di samping mengakui perlunya arahan dari pihak

pendidik; (4) pelaksanaan pendidikan atas dasar impuls yang muncul secara insidental pada si pendidik; (5) kebenaran dasar tindakan pendidikan semata-mata kepada situasi sosial yang dibatasi oleh kesementaraan ruang dan waktu; dan (6) sikap kurang berani merumuskan tujuan akhir pendidikan dan hanya sampai mengutak-atik hasil yang dibatasi oleh ke-disinian dan ke-kinian (*here and now*). Keenam wawasan pendidikan di atas tidak akan memberikan hasil yang memuaskan karena berbagai kelemahan yang dikandungnya. Manusia utuh yang memuaskan hanya dapat dicapai melalui pendidikan tuntas, yang mencerminkan manusia kaffah, dalam arti satunya niat, pikir, ucap, perilaku dan tujuan, yang direalisasikan dalam hidup bermasyarakat. Dalam perspektif filosofis ini hendaknya pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling (BK) dikembangkan. Lebih spesifik lagi, dalam kompetensi konselor profesional. Dengan kompetensi konselor yang profesional dan dilengkapi dengan profesionalitas layanan lainnya (seperti pengajaran oleh guru, pendidikan oleh orang tua), diharapkan dapat menghasilkan individu/siswa yang utuh.

Sentral pengembangan BK, secara spesifik difokuskan pada kompetensi konselornya dalam menampilkan kinerja tertinggi yang diabdikan kepada pengguna layanan konseling itu sendiri. *"The social complexity and rapid rate of social change increase the need for raising the level of competence in counseling"* (Rao; 1981: 234). Kompetensi konselor itu dikembangkan dengan mengacu pada pandangan hakikat

manusia. Acuan ini wajar karena permasalahan kehidupan manusia itu muncul dari permasalahan-permasalahan filosofis dalam pandangan dunia dalam dirinya.

"Philosophical counseling' refers to a process in which a counselor (note: apparently not necessarily a philosopher!) works with a client to critically reflect on the ideas and world-views associated with a specific life-problems...preliminarily defined by the client...These life problems must arise from philosophical problems in the implicit world-view of the client" (Shlomit C. Schuster, 1999).

Isu filosofis dalam konseling perlu dibahas sebagai sebuah kenyataan karena pemahaman atau cara pandang terhadap isu ini akan menentukan bagaimana sosok konselor dikembangkan dan bagaimana konselor membantu klien. Bagaimana klien menjadi lebih baik karena upaya konselor. Klien sebagai pengguna jasa layanan merupakan titik tuju dan sekaligus tolok ukur keberhasilan layanan konseling oleh konselor. Menjadi seperti apa klien itu adalah sebagai hasil intervensi dan pengaruh keterandalan konselor. Keterandalan konselor ini menumbuhkan kepercayaan publik (*public trust*) maupun akuntabilitas, sehingga profesi ini semakin diakui, dimanfaatkan keberadaannya. Kompetensi itu perlu dibakukan, dicapai sesuai harapan tiap konselor. Dengan demikian, krusial sekali dihasilkan atau dibakukan standar kompetensi konselor profesional di Indonesia. Standar ini dirumuskan dari hasil kesepakatan pertimbangan pakar konseling untuk memenuhi kebutuhan klien di lapangan. Standar ini amat berguna untuk dasar penyiapan sarjana bimbingan konseling pada pendidikan konselor (sebelum S1) dan

penyiapan melalui pemberian sertifikasi maupun lisensi pada sarjana bimbingan konseling (setelah S1) melalui pendidikan profesi oleh ABKIN dan LPTK; serta diharapkan sebagai dasar evaluasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kinerja konselor (profesionalisasi) di lapangan. Standar kompetensi ini dikembangkan bukan untuk konselor pada setting tertentu saja, misalnya yang bertugas di SD, SMTP, SMA, PT atau masyarakat saja, melainkan untuk konselor umum Indonesia yang ditentukan dengan persyaratan pencapaian standar minimal kompetensi melalui proses penyiapan terstandar pendidikan konselor maupun pendidikan profesi. Ini berarti standar ini dapat dipandang sebagai instrumen fundamental profesionalisasi konselor.

Para pendidik, konselor diharapkan sadar dan jeli kepada beberapa hal pokok berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja (1990:15), pertama-tama adalah kesadaran akan perbedaan individu, kedua, kesadaran akan perlunya sistem pengajaran dan pelayanan pendidikan lainnya yang lebih terfokus pada diri siswa, ketiga kesadaran akan perlunya konsep demokratis diaplikasikan dalam upaya pendidikan secara tepat, keempat, kesadaran akan permasalahan yang dihadapi individu dalam masyarakat yang beragam, dan senantiasa berubah; kelima, kesadaran akan rumit dan muskilnya persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan modern.

Untuk itu, paradigma baru dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) harus mengacu pada pendidikan

multikultural, yaitu adanya kebudayaan beragam dalam satu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan. Namun kesatuan itu bersifat jamak. Kejamakan itu berbeda satu dengan lainnya. Berbeda, berarti memiliki kekhususan, adanya variasi, ada heterogenitas serta hubungan persamaan dan perbedaan antara kelompok kultur tertentu yang bukan merupakan pertentangan antar kelompok atau satu sama lainnya bersikap eksklusif. Paradigma pendidikan multikultural ini berkembang seiring dengan hak dan keunikan siswa individual yang belajar bersama dengan yang lain dalam suasana saling menghormati; toleransi; berpengertian (Conny Semiawan, 2003:103). Pentingnya keberagaman itu disatujikan menjadi pertimbangan pengembangan substansi standar kompetensi konselor profesional dan selaras dengan pernyataan Kim, U. et al. (1994: 32-33) berikut,

Collectivism is defined by explicit and firm group boundaries. It is considered to be more than the mere sum of individual characteristics. In collectivist societies, one of the most important differentiations made about individual is whether a person is part of an in-group or an out-group. Collectivist cultures emphasize a we versus they distinction. The emphasis on collective welfare, harmony, and duties typically applies only to the in-group and usually does not extend to out-groups.

Salah satu pertanyaan yang penting diajukan untuk menilai kualitas penyelenggaraan BK di sekolah adalah apakah pekerjaan dan fungsi BK itu telah dilaksanakan oleh setiap personil sekolah secara profesional apakah keprofesionalan tenaga konselor di SMA itu telah mencapai standar profesional yang telah disepakati oleh para pakar dan kalangan praktisi dalam bidang BK ? Pertanyaan ini seyogianya menjadi penggerak

motivasi intrinsik bagi tiap insan BK untuk membuktikan aktualisasi kerjanya nyata di sekolah. Meskipun standar kompetensi konselor profesional yang dihasilkan dari studi yang sistematis, cermat dan empirik belum dihasilkan maupun disepakati.

Pertanyaan di atas semakin penting karena didorong oleh keadaan profesi kependidikan pada umumnya dan profesi konselor pada khususnya. Penulis berpendapat bahwa fenomena yang kurang menguntungkan itu menunjukkan adanya pembinaan atau kondisi yang belum memadai untuk menghasilkan konselor profesional, baik pada latar pendidikan konselor maupun medan tugas konselor di setting sekolah dan setting masyarakat. Pada medan tugas konselor, misalnya di sekolah masih banyak masalah klien terbengkalai dan belum secara menonjol ditanggjawabkan konselor. Sekaitan dengan latar belakang pendidikan konselor, terdapat sinyalemen bahwa konselor belum mampu mengunjukkerjakan layanan BK yang berkualitas. Keadaan tersebut tentu harus ditangani secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan pada pengamatan penulis terhadap berbagai berita di media massa-cetak dan elektronik didapatkan gejala-gejala bahwa berbagai masalah pada usia remaja baik di SMA maupun di masyarakat makin meluas, baik dilihat dari frekuensi maupun variabilitas masalahnya. Misalnya masalah psiko-sosial, karier, belajar, pribadi, dan telah cukup sering menjurus kepada tindakan kriminal (seperti penggunaan narkotik dan bahan terlarang (narkoba), pencurian kendaraan bermotor), dan



anggaran norma masyarakat (seperti pergaulan antar jenis kelamin). Perlu dicermati informasi bahwa 73,4 % pengguna narkoba di Sumatera Utara adalah usia sekolah (Analisa, 3 April 2005). Data ini perlu konfirmasi dari sumber-sumber lain. Penyalahgunaan narkoba yang meluas terjadi di kalangan remaja sebagai akibat dari semakin tak tertanganinya masalah pribadi psiko-sosial dengan baik dan sangat meresahkan berbagai pihak. Masalah-masalah lain pada remaja berkenaan dengan perencanaan karier yang belum mantap di sekolah, cara belajar serta penggunaan waktu yang kurang efektif. Semua persoalan tersebut membawa implikasi pentingnya kompetensi konselor profesional dikuasai untuk tujuan meningkatkan pelayanan sehingga permasalahan siswa dapat ditangani.

Di samping itu, tugas perkembangan yang harus dipenuhi remaja yang sedang tumbuh, sebagaimana dikemukakan oleh Havighurst (1953: 120-158), pencarian identitas diri (*searching for self-identity*) yang diistilahkan oleh Erick Erikson (Wrenn, 1968: 5), yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap (matang) serta berbagai kompleksitas masalah remaja lainnya tidak akan dapat dipenuhi dengan baik jika konselor tidak mampu melaksanakan tugas secara profesional. Tugas ini tidak patut dilimpahkan kepada guru yang sejak semula telah disibukkan oleh tanggung jawab kurikuler, meskipun fungsi bimbingan dalam proses belajar mengajar tetap dilakukan sesuai proporsinya. Permasalahan dan tuntutan tersebut di atas seyogyanya dapat diintervensi melalui layanan BK berkualitas dari seorang konselor profesional.

9

Beranjak dari pemikiran bahwa perkembangan itu berlangsung dalam suatu kondisi interaksi sosial, maka proses bimbingan juga merupakan proses interaksi sosial. Dalam kerangka berpikir ini akan kelihatan bahwa proses bimbingan tidak bisa lepas dari proses memberi pengaruh yang memungkinkan siswa memperbaiki dan mengubah perilakunya ke arah perkembangan yang diharapkan. Dilihat dari perspektif psikologis, pemberian pengaruh ini bukan dalam arti membawa siswa ke arah yang dapat memuaskan konselor, tetapi dalam arti menciptakan suasana emosional dan psikologis yang kondusif bagi perkembangan siswa (*emotional and psychological comfort*). Tampak bahwa kondisi penyelenggaraan BK di sekolah dibutuhkan untuk menampilkan kinerja optimal yang berdampak pada penciptaan keadaan di atas.

Dilihat dari perspektif historis, BK pertama sekali dirintis di Indonesia dengan didirikannya jurusan bimbingan dan konseling di UPI (IKIP Bandung saat itu) pada tahun 1964 yang dibidani oleh Dr. Mochtar Buchori, M.Ed. Perkembangan selanjutnya mengenai konseling pada kurun waktu terakhir adalah keluarnya UUSPN tahun 2003 tentang penegasan konselor sebagai profesi yang memungkinkan diselenggarakannya pendidikan akademik atau profesi. BK telah diakui tumbuh memberikan kontribusi positif dalam membantu perkembangan siswa, walaupun masih dirasakan berbagai masalah. Rochman Natawidjaja (1990: 16) secara tegas menyatakan bahwa "BK memiliki



fungsi dan posisi kunci dalam pendidikan di sekolah, yaitu sebagai pendamping fungsi utama sekolah dalam bidang pengajaran dan intelektual siswa dalam menangani ikhwal sisi sosial-pribadi siswa." Seiring dengan pendapat ini, M.D. Dahlan (1988: 26-27) mengatakan bahwa: "...bimbingan dan penyuluhan selalu merupakan suatu momen ilmu mendidik..." Dari kedua pendapat di atas, jelaslah bahwa BK di SMA merupakan layanan esensial pendidikan untuk mengoptimalkan serta membangkitkan potensi dan perkembangan siswa.

Hingga saat ini masih cukup terdengar suara sumbang tentang kinerja konselor berkenaan dengan fungsi dan tanggung jawabnya di SMA, yakni masih ditemukan perilaku kurang profesional. Melalui berbagai hasil penelitian mengenai penampilan konselor di sekolah, ditemukan bahwa perilaku konselor yang kurang profesional memunculkan impresi maupun persepsi kurang positif. Hasil penelitian M. Asrori (1990) menunjukkan bahwa kinerja petugas bimbingan baru 40,63% yang termasuk kategori "tinggi" dan 59,37 % termasuk kategori "sedang". Konselor dianggap siswa masih belum memiliki kemampuan seperti yang diharapkan dalam aspek keterampilan konseling individual. Penelitian Juntika (1993) menemukan bahwa pelaksanaan konseling oleh guru pembimbing belum sesuai dengan yang diharapkan, yakni masih kurangnya kemampuan pembimbing dalam menangani dan menggali masalah yang dihadapi siswa. Temuan yang masih sejalan, Marjohan (1994) menemukan bahwa baru 39,47% guru pembimbing yang dapat

menerapkan kemampuan profesional konseling dalam kategori "tinggi", sedangkan 60,53% baru mampu menerapkan kemampuan tersebut pada kategori "sedang".

Selaras dengan kondisi di atas, Pine (1974) mengemukakan kritik terhadap konselor, antara lain: ketika bertugas konselor tidak memakai prosedur yang semestinya dan belum begitu terlatih untuk menggunakan teknik dan prosedur profesional. Ia mengatakan bahwa banyak konselor menjadi agen institusi mengenai tugas-tugas administrasi di sekolah. Konselor lebih banyak melakukan pekerjaan administrasi sekolah, ketimbang tugas BK. Sedangkan Brossard dalam (Nugent, 1981: 106), mengemukakan pula bahwa "konselor rendah mutunya dalam latihan dan kepribadian serta mereka tidak dapat menciptakan hubungan intim dengan siswa." Menurut Bucker dalam (Nugent, 1981: 107), "konselor sekolah tidak mengetahui apa peran mereka yang sebenarnya di sekolah." Tampaknya, substansi materi dan keberhasilan pendidikan konselor (*pre-service training*) untuk merekrut atau menseleksi, mendidik dan menghasilkan cikal bakal konselor profesional patut direvitalisasi, dipertanyakan kembali. Inovasi apapun yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan tanpa disertai dengan peningkatan mutu kinerja guru (Holmes Group, 1986), dan konselor. Perlu dikemukakan bahwa konselor juga berperan sebagai pendidik dan pengajar.

Berdasarkan pada studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMAN IV dan SMAN II Medan, ditemukan bahwa latar belakang pendidikan konselor masih amat variatif. Masih banyak guru BK berlatar belakang pendidikan sarjana muda maupun sarjana yang berkeahlian bukan BK; perbandingan jumlah konselor dan siswa belum rasional; program kerja BK bersifat insidental; pengakuan dan keterlibatan masyarakat terhadap BK belum cukup; belum terampil dan mampu melakukan konseling dan tes serta non-tes; konselor yang mengikuti instruksi kepala sekolah secara terpaksa, kepala sekolah juga belum peduli dan belum menguasai tentang BK, demikian pula dengan guru.

Dapat disimpulkan bahwa sekolah sebagai suatu organisasi kurang menunjukkan suasana kerja yang kondusif terhadap pelaksanaan layanan konseling yang berkualitas. Kondisi ini terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal konselor. Faktor internal konselor mencakup antara lain kemampuan dan keterampilan, motivasi kerja, penguasaan keahlian; sedangkan faktor eksternal konselor dapat dikemukakan mencakup iklim sekolah, dukungan dan partisipasi aparat sekolah lain, gaya kepemimpinan kepala sekolah, guru-guru, siswa-siswa, dan orang tua. Tampaknya, "kesahihan spektrum konselor perlu dikaji lebih lanjut melalui studi lapangan yang cermat dan sistemik" (Rochman Natawidjaja, 2003:107).

Berdasarkan pada fakta mendesaknya masalah-masalah siswa yang kompleks dan meluas, kurang profesionalnya kinerja konselor serta

tuntutan perubahan yang terjadi dalam persaingan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, maka penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan standar profesionalisme konselor yang dikembangkan dari faktor-faktor penentu dalam diri konselor itu sendiri seperti sikap, pengetahuan, keterampilan. Faktor-faktor tersebut adalah kunci layanan BK secara profesional. Untuk menghasilkan standar dimaksud, penulis mengajukan pertanyaan pokok: "bagaimana pengembangan standar kompetensi profesionalisme konselor dilakukan"?

1.2 Pembatasan dan Rumusan Masalah

Suatu keadaan dikatakan sebagai masalah apabila keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada dalam kenyataan, sehingga menimbulkan pertanyaan.

Secara umum, penelitian ini diharapkan menghasilkan standar kompetensi konselor profesional yang tervalidasi secara empirik oleh para pakar BK di Indonesia. Sedangkan, pada kenyataannya, standar kompetensi konselor profesional yang ada masih perlu diuji secara empirik mendalam dalam konteks ke-Indonesia-an yang dapat dijadikan dasar pendidikan konselor ataupun pendidikan profesi yang berangkat dari tuntutan dan kebutuhan nyata tugas konselor di lapangan.

Dengan adanya standar profesionalisme konselor, secara konsekuensial berarti memberdayakan kondisi objektif profesionalisme konselor di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan standar

perilaku profesionalisme konselor itu disebabkan oleh kondisi internal (*internal environment*) dan kondisi eksternal (*external environment*) dimana standar tersebut dikembangkan. Kondisi internal dalam menampilkan profesionalisme konselor dalam penelitian ini dikemukakan dalam hal ini sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kondisi eksternal yang turut memberi kontribusi bagi terwujudnya pemberdayaan profesionalisme konselor mencakup peran maupun fungsi personil sekolah lainnya dalam mendukung tampilnya perilaku profesionalisme konselor tersebut. Keseluruhan kondisi internal maupun eksternal di atas yang mengacu kepada lingkungan dan tugas perkembangan remaja di SMA dikembangkan menjadi suatu standar profesionalisme konselor yang diharapkan atau sesuai standar profesional yang ditetapkan. Karena begitu luasnya faktor penentu standar perilaku itu peneliti memfokuskan masalah pada aspek personal, profesional, dan kependidikan sebagai aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan profesi konseling di setting sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan pada studi pendahuluan yang penulis lakukan di dua SMAN di Medan diperoleh kesan bahwa profesionalisme konselor yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan, kemampuan konselor dalam menampilkan ruang lingkup profesinya terkesan masih kurang efektif.

Penelitian ini mengungkap materi profesionalisme konselor mencakup antara lain sikap, pengetahuan, keterampilan: membina hubungan antar pribadi (Ciri-ciri Kepribadian(CK)); Kompetensi Konseling

Anak dan Remaja (KAR); Kompetensi Konseling Kelompok (KK); Kompetensi Konseling Individual (KI); Kompetensi Konseling Sekolah (KS); Kompetensi Konseling Adiksi (KA); Kompetensi Konseling Pra-nikah/Perkawinan/Keluarga (KPPK) dan Kompetensi Multikultural dan Populasi Khusus (KMPK), Kompetensi Pengembangan Program Bimbingan (KPPB); Kompetensi Pengembangan Karier Klien (KPKK); Kompetensi Konsultasi (KKo); Kemampuan Diagnosis, Dokumentasi, Rekord dan Referral (KDDR), Kompetensi Supervisi Konselor (KSK); dan Kompetensi Evaluasi dan Riset (KER), Kompetensi Pengukuran (KP), Perkembangan Individu (PI), dan Kompetensi Kependidikan (KPn). Integrasinya melandasi dan terintegrasi dalam keseluruhan dimensi kompetensi.

Keseluruhan isi materi kompetensi di atas dianggap telah diupayakan sedapat mungkin meliputi keseluruhan kompetensi konselor profesional untuk konselor umum Indonesia dalam setting sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, masalah penelitian ini dirumuskan: "Kompetensi-kompetensi konselor profesional apa sajakah yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi konselor profesional ? Bagaimana standar kompetensi konselor profesional dihasilkan ?

1.3 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka masalah penelitian ini difokuskan pada pengembangan standar profesionalisme konselor umum dalam setting sekolah dan masyarakat. Standar akan lebih bermakna apabila dijadikan dasar oleh konselor di

sekolah atau masyarakat dalam bentuk performansi aktual (kinerja nyata). Konselor ini secara faktual berlatar belakang pendidikan BK dan non-BK di dalam rentang kondisi penyelenggaraan bimbingan dari memadai hingga kurang memadai. Secara lebih operasional, fokus masalah di atas dapat diidentifikasi secara lebih terinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut :

- 1.3.1 Sampai tingkat mana performansi aktual kompetensi konselor profesional secara keseluruhan maupun bila dilihat dari masing-masing dimensi kompetensi konselor profesional di SMAN ?
- 1.3.2 Sampai tingkat mana performansi aktual kompetensi konselor profesional berdasarkan latar belakang pendidikan konselor dan kondisi penyelenggaraan BK baik secara keseluruhan maupun dilihat dari masing-masing dimensinya ?
- 1.3.3 Kompetensi-kompetensi apasaja yang termasuk dalam kompetensi inti, kompetensi khusus, dan kompetensi bersama? Mengapa ketiga kompetensi tersebut penting ?
- 1.3.4 Sampai tingkat mana ambang batas profesionalitas yang realistis dicapai konselor ?
- 1.3.5 Bagaimanakah standar akhir kompetensi konselor profesional dihasilkan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Beranjak dari permasalahan di atas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu standar kualitas kompetensi konselor

profesional untuk dijadikan dasar peningkatan kualitas kinerja konselor dalam profesi konseling. Standar ini dirumuskan dari hasil kesepakatan pertimbangan pakar konseling untuk memenuhi kebutuhan klien di lapangan. Standar ini akan amat berguna bagi dasar penyiapan sarjana bimbingan konseling oleh pendidikan konselor (sebelum S1) dan penyiapan melalui pemberian sertifikasi maupun lisensi pada sarjana bimbingan konseling (setelah S1) melalui pendidikan profesi oleh ABKIN dan LPTK; serta diharapkan sebagai dasar evaluasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kinerja konselor (profesionalisasi) di lapangan. Standar kompetensi ini dikembangkan bukan untuk konselor yang bertugas di SD, SMTP, SMA, PT atau masyarakat atau antar negara di tingkat internasional saja, melainkan bagi konselor umum Indonesia yang ditentukan dengan persyaratan pencapaian standar minimal kompetensi melalui proses penyiapan terstandar pendidikan konselor maupun profesi. Untuk mencapai standar kompetensi konselor profesional, ditemukan terlebih dahulu konstruk bangun kompetensi konselor profesional.

Pada saat menghadapi klien, kompetensi konselor terstandar yang ditampilkan penting kongruen atau merupakan respon terhadap hakikat kepedulian klien, sebaliknya, tidak penting menunjukkan kompetensi konselor yang tidak kongruen terhadap kepedulian unik klien.

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data empirik tentang:

- 1.4.1 tingkat performansi aktual kompetensi konselor profesional secara keseluruhan dan menurut masing-masing dimensinya di Indonesia dewasa ini.
- 1.4.2 tingkat performansi aktual kompetensi konselor profesional menurut tiap-tiap dimensi bila dilihat dari latar belakang pendidikan konselor, kondisi penyelenggaraan BK.
- 1.4.3 kategorisasi kompetensi konselor profesional yang termasuk dalam kompetensi inti, bersama, dan khusus serta alasan pentingnya kompetensi tersebut.
- 1.4.4 tingkat ambang batas profesionalitas konselor yang realistis.

Jika nomor 14.1 dan 14.2 merupakan pencapaian tujuan khusus penelitian, maka nomor 14.3 dan 14.4 di atas merupakan data empirik yang dibutuhkan untuk keperluan pengembangan standar kompetensi konselor profesional (pencapaian tujuan umum penelitian).

1.5 Signifikansi dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana dikemukakan pada bagian latar belakang penelitian, penelitian ini merupakan pemecahan masalah yang krusial untuk menghasilkan standar profesionalisme konselor secara konkret. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan signifikan karena dengan dihasilkannya standar kompetensi konselor profesional berimplikasi terhadap kualitas layanan BK yang dialami pengguna jasa layanan (para siswa) apabila dijadikan dasar dalam memberi layanan.

Secara teoretik, hasil penelitian ini memberi temuan baru yang bermanfaat mengenai bangun konstruk kompetensi konselor profesional sebagai produk penelitian ini (dalam bentuk bagan 4.1). Secara eksplisit, konstruk tersebut memiliki relevansi tinggi terhadap pendidikan konselor maupun pendidikan profesi terstandar. Dengan kata lain, pendidikan konselor dan profesi terstandar ini (ditanggungjawab oleh LPTK dan ABKIN) akan menyelenggarakan proses pendidikan berdasarkan konstruk dimensi kompetensi yang ditemukan dalam rangka penganugerahan konselor profesional.

Standar kompetensi konselor profesional ini diperuntukkan bagi kepentingan klien. Secara konseptual, tugas-tugas lingkungan perkembangan klien menjadi kepedulian utama pengembangan standar di atas atau performansi konselor. Oleh karena klien yang akan dijangkau standar ini hidup dalam kultur masyarakat kolektif (klien Indonesia) yang lebih menekankan interdependensi ketimbang independensi (nilai-nilai, kepuasan dan harga diri klien ditentukan oleh keberartiannya dalam kelompok (*relevant others*)), maka atas nama kepentingan kesejahteraan klien tersebut di atas patut pula dibangun *rapport* dengan klien selama pembukaan konseling dimulai dengan mengungkap perasaan klien dalam kaitannya dengan orang-orang terdekat yang dicintainya. Kecenderungan kolektivisme di atas mengimplikasikan unsur perasaan dalam *interpersonal relationship* lebih dominan daripada rasionalitas. Karena akar konseling Indonesia diawali dan tumbuh dalam pendidikan, maka

konselor juga berperan sebagai pendidik, yang dituntut untuk memiliki kompetensi kependidikan.

Secara praktis-operasional, hasil penelitian ini akan berguna bagi para praktisi kependidikan di sekolah (kepala sekolah, guru-guru, konselor dan personil sekolah lainnya). Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat membantu memahami, merencanakan, mengarahkan, memfasilitasi kualitas pelaksanaan layanan BK profesional dalam bentuk pengembangan *in service training*. Bagi konselor, hasil ini menambah kesadaran akan pentingnya kerja sama personil sekolah dalam memberikan layanan konseling profesional sehingga konselor perlu menyiapkan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan BK profesional. Bagi guru, dapat diungkap secara jelas mengenai porsi penerapan peran bimbingan yang dilakukan di sekolah. Dengan tersedianya layanan BK profesional di sekolah, masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan siswa akan dapat diatasi dan dipenuhi, sehingga kuantitas maupun kualitas masalah para siswa remaja yang kompleks itu akan berkurang, bahkan teratasi.

Manfaat bagi para pengambil kebijakan adalah tergugahnya kepedulian membina BK profesional secara terencana di sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan pengajaran serta lebih komit mendorong penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan konselor di seluruh Indonesia pada setiap sekolah. Standar ini dapat menjadi alat ukur keberhasilan menjadi konselor profesional, karena



standar ini bermuatan kompetensi beranah tidak saja kognitif, tetapi afektif dan psikomotorik, maka seseorang dinyatakan berhasil menjadi konselor profesional apabila telah melalui proses pendidikan dan pelatihan konselor yang intensif oleh LPTK. Hasil penelitian dapat pula dijadikan referensi, baik bagi peneliti lebih lanjut maupun dalam penulisan naskah yang berkaitan dengan masalah bimbingan. Referensi itu dapat berupa ulasan untuk mendukung teori yang telah ada atau dapat juga digunakan untuk menyesuaikan teori yang ada dengan kondisi di lapangan.

1.6 Metode Penelitian

Sehubungan dengan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan *Research and Development (R & D)*. Pendekatan R & D ini dilakukan dengan menerapkan metode *Delphi*, yakni metode yang digunakan untuk mengevaluasi, mengelola, menyepakati secara bulat pendapat-pendapat para pakar BK tentang kompetensi konselor profesional. Subyek penelitian adalah para pakar BK di perguruan tinggi dan konselor di SMAN di kota Bandung, Malang, dan Padang. Sampel diambil secara *purposive sampling*. Alasan perekrutan subyek konselor di tiga kota tersebut adalah bahwa pendidikan pascasarjana (S2, S3) maupun pendidikan sarjana (S1) BK telah dilaksanakan, yang memungkinkan konselor praktisi telah sering berinteraksi, berkolaborasi, serta mengakses informasi BK untuk kepentingan kualitas kinerjanya di sekolah.